

RENCANA AKSI TAHUN 2023
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ALASAN (PERMASALAHAN YANG AKAN DISELESAIKAN)	RENCANA AKSI	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANAAN TRIWULAN KE-				KETERANGAN
														1	2	3	4	
1	Meningkatnya Produktivitas Sektor Perdagangan	1	Persentase Kenaikan Volume Perdagangan	25%	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Pengendalian Fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan Pengawasan distribusi Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya ditingkat daerah Kab/Kota	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhaap pengguna akhir bahan berbahaya (PA-B2) maupun produsen B2 (P-B2)	Jumlah laporan hasil pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya terhadap distributor B2 pengguna akhir bahan berbahaya (PA-B2) maupun produsen B2	2 kali pengawasan	Pengawasan bahan berbahaya yang beredar di pasaran	Pengawasan bahan berbahaya	18,935,100	Bidang Perdagangan dan Industri	1	1	0	0	
						Penertiban izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan	Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah rekomendasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	100 usaha	Pengawasan terhadap izin usaha bagi pelaku usaha yang ada di kota padang panjang	Pengawasan izin usaha	51,251,000	Bidang Perdagangan dan Industri	25	25	25	25	
					Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota	Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam satu kabupaten/kota	Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) kabupaten/kota	250 pelaku usaha	Pemantauan harga bahan pokok	Pemantauan harga bahan pokok	7,598,700	Bidang Perdagangan dan Industri		100		150	
					Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan metrologi legal berupa, tera, tera ulang dan Pengawasan	Pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, Tera Ulang	Jumlah peralatan UTPP yang ditera/tera ulang	1000 UTPP	Jumlah UTPP	UTPP yang ditera ulang	209,644,113	UPTD Metrologi Legal			500	500	
					Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Ddalam Negeri	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Dekranasda yang Difasilitasi	3 kegiatan	Produk ikm yang di fasilitasi pemasaran	Pelaksanaan pameran	505,354,700	Bidang Perdagangan dan Industri					3
							Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kab/ Kota	Jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	120 UMKM									
2	Meningkatnya produktivitas sektor Industri		Persentase Peningkatan Asset dan Omset IKM	7%	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	242 ikm	Pembinaan terhadap IKM	Workshop, pendampingan dan pembinaan lainnya dan pengelolaan updt kulit	786,782,750	Bidang Perdagangan dan Industri					242
							Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	1 dokumen	Pengelolaan UPTD Kulit								
					PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPIUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi	Jumlah IKM yang di terbitkan rekomendasi IUI, izin perluasan Usaha Industri (IPIUI), izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)	30 ikm	Pengawasan izin industri yang masuk dalam aplikasi SIINAS	Pemantauan dan pengawasan	3,054,800	Bidang Perdagangan dan Industri					30

3	Meningkatnya Koperasi aktif berpola syariah	Persentase Peningkatan Asset dan Omset Koperasi berpola Syariah	78%	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	Pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang telah dilakukan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas	25 koperasi	Jumlah Koperasi yang dilakukan pengawasan	Pengawasan dan pembinaan koperasi	39,047,900	Bidang Koperasi dan UKM				33
				Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	Pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah fasilitasi legalitas koperasi syariah	30 koperasi	Legalisasi koperasi syariah	Fasilitasi perubahan Anggaran Dasar koperasi menjadi koperasi syariah	110,227,900	Bidang Koperasi dan UKM				10
				Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yg Wilayah Keanggotaan dalam daerah Kota Pd.Panjang	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Bimtek yang dilaksanakan	4 kali bimtek	Pelaksanaan pelatihan bagi koperasi	Bimtek bagi pengurus koperasi	429,026,500	Bidang Koperasi dan UKM			4	
					Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Jumlah Bimtek yang dilaksanakan	4 kali bimtek	Pelaksanaan pelatihan bagi ukm	Bimtek bagi ukm					4	
4	Meningkatnya produktivitas UMKM	Persentase peningkatan asset dan omset ukm	63%	Program Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemandirian perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro	Jumlah usaha mikro yang diberikan fasilitasi pembiayaan	130 ukm	Pembinaan terhadap ukm baik bantuan modal maupun pembinaan lainnya	Bantuan modal dana bergulir	310,000,000	UPTD Dana Bergulir				130
						Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	Jumlah UMKM yang di bina	80 ukm	Pembinaan bagi wirausaha menjadi usaha mikro	Coaching klinik dan pelatihan	143,208,100	Bidang Koperasi dan UKM				40
5	Penurunan angka kemiskinan sektor UMKM	Persentase kenaikan pendapatan UMKM	35%	Program pengembangan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SD M serta desain dan teknologi	Jumlah usaha mikro yang diberikan bantuan	50 UMK	upaya untuk menambah pendapatan bagi ukm miskin	Pemberian bantuan peralatan, perbaikan warung dan isi warung	350,223,000	Bidang Koperasi dan UKM				50
6	Peningkatan indeks kualitas pelayanan infrastruktur	Indeks kualitas layanan infrastruktur perdagangan	80%	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar ber-SNI dan tertib ukur	Penyediaan Sarana distribusi Perdagangan	1. Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan 2. Jumlah unit pasar yang dikelola	1 prasarana	Penciptaan pasar rakyat yang representatif sesuai dengan standar Badan Akreditasi Nasional	Pengadaan sarana pasar	1,874,304,000	Bidang Pengelolaan Pasar				1
						Fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan		1 unit	Penertiban pasar	Penertiban Pasar	2,927,327,300	Bidang Pengelolaan Pasar				1

Padang Panjang, 02 Januari 2023
Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM
Kota Padang Panjang



JEFFER EKA PUTRA, ST.MT)

NIP. 197608302003121002

